A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Di bawah ini makna peraturan perundang-undangan nasional yang benar adalah... .
   A. Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
   B. Aturan-aturan yang menjadi pedoman dalam menjalankan hubungan antar sesama manusia sebagai warga negara (warga masyarakat).
   C. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden.
   D. segala ketentuan dan aturan tentang ketetanegaraan baik tertulis maupun tidak tertulis

2. Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan hukum nasional. Wujud dari konsekuensi tersebut adalah ….
   A. dibentuk peraturan perundang-undangan oleh lembaga yang berwenang
   B. penyusunan lembaga parlemen pemerintahan yang berlandaskan otoriter
   C. dibentuk panitia khusus penyusun undang-undang pengganti undang-undang dasar
   D. penyelarasan peraturan perundang-undangan Indonesia dengan mahkamah internasional

3. Berikut ini yang termasuk prinsip-prinsip atau asas umum tata urutan peraturan perundang-undangan adalah... .
   A. Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang sama
   B. Bukan hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis.
   C. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah
   D. Peraturan Perundang-undangan yang baru tidak dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan lama

4. Menurut UU No.12 Tahun 2011, tata urutan peraturan perundang-undangan yang paling tinggi adalah... .
   A. TAP MPR
   B. UU
   C. PP
   D. UUD NRI Tahun 1945

5. Perhatikan peraturan di bawah ini !
   (1) PP
   (2) TAP MPR
   (3) Perda Prop
   (4) UU/ PERPPU
   (5) Perda kab/ko
   (6) UUD NRI Tahun 1945
   (7) Perpres

   Berdasarkan undang-undang No. 12 Tahun 2011 dan perubahannya, tata urutan peraturan perundang-undangan nasional yang tepat adalah ….
   A. (2), (1), (3), (7), (5), (3), (6)
   B. (6), (2), (4), (1), (7), (3), (5)
   C. (6), (3), (2), (4), (5), (2), (7)

LIVEWORKSHEETS

D. (1), (5), (7), (3), (2), (6), (4)

6. Menurut UU No. 12 Tahun 2011, Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan yang berada di bawah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah... .
   A. TAP MPR
   B. Perppu
   C. PP
   D. UU

7. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menempati urutan terakhir dalam Tata urutan peraturan perundang-undangan nasional menurut UU No. 12 Tahun 2011 adalah... .
   A. Perda Provinsi
   B. Peraturan Presiden
   C. Perda Kabupaten/Kota
   D. Peraturan Pemerintah

8. Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang dibuat oleh Presiden dalam keadaan memaksa bisa berubah status menjadi Undang-Undang apabila mendapat persetujuan dari... .
   A. MPR
   B. Menteri
   C. DPR
   D.MA

9. Lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang menurut pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945 adalah... .
   A. MPR
   B. DPR
   C. DPD
   D. Presiden

10. *Judicial review* undang-undang terhadap Undang-Undang dasar 1945 dilakukan oleh... .
    A. MPR
    B. Presiden
    C. MA
    D. MK

11. Muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Jadi peraturan pemerintah dibentuk untuk menjalankan undang-undang. Dalam pembentukan peraturan pemerintah yang terlibat di dalam proses penyusunannya yaitu... .
    A. DPR bersama-sama dengan Presiden
    B. Presiden, menteri/kepala LPND yang terkait, dan menteri sekretaris Negara
    C. DPR, menteri/kepala LPND yang terkait, dan menteri sekretaris Negara
    D. DPR, Presiden, menteri/kepala LPND yang terkait, dan menteri sekretaris Negara

12. Perhatikan gambar di bawah ini!

LIVEWORKSHEETS

Peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk oleh... .
A. Walikota Semarang
B. DPRD, Gubernur dan Walikota
C. DPRD Provinsi dan Walikota
D. DPRD Kota bersama Walikota

13. Di bawah ini yang **bukan** merupakan tata cara perubahan UUD sesuai pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 adalah... .
A. usul perubahan pasal-pasal diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya
B. sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR
C. khusus berkaitan dengan NKRI tidak dapat dilakukan perubahan
D. putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurang 50% dari anngota MPR

14. Perhatikan tahapan-tahapan berikut ini!

1) Perencanaan
2) Pembahasan
3) Pengundangan
4) Penyusunan
5) Pengesahan

Tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah….

A. 1), 2), 4), 5), dan 3)
B. 3), 1), 4), 5), dan 2)
C. 4), 1), 3), 5), dan 2)
D. 1), 4), 2), 3), dan 5)

15. Tahapan pertama proses usulan pembuatan undang-undang yang diajukan oleh DPR adalah... .
A. pembahasan rancangan undang-undang olleh menteri yang ditugaskan Presiden bersama DPR.
B. rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang
C. pengajuan rancangan undang-undang secara tertulis kepada presiden
D. persetujuan bersama DPR dan Presiden

16. Tahap terakhir dari proses penyusunan Peraturan Pemerintah adalah... .
A. pemantapan konsepsi rancangan
B. pembahasan dan penetapan oleh kementrian
C. penyusunan rancangan dan membentuk Panitia
D. penetapan oleh presiden kemudian diundangan oleh Sekretaris Negara

17. Setiap warga negara salah satu kewajibannya adalah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terkecuali pelajar. Sikap Anda sebagai pelajar terhadap perilaku masyarakat yang main hakim sendiri adalah... .
A. ikut menghakimi orang yang dianggap bersalah tersebut
B. melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian
C. sembunyi agar tidak jadi saksi peristiwa itu
D. membiarkan saja karena bukan urusan kita

18. Salah satu contoh peraturan perundang undangan nasional ialah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

LIVEWORKSHEETS

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Contoh perilaku yang mencerminkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut adalah... .

A. menyebarkan informasi berkaitan dengan keilmuan untuk dijadikan sebagai sumber belajar
B. turut menyebarkan berita yang sedang ramai diperbincangkan
C. bebas memberikan komentar di media sosial
D. mengambil informasi untuk dipublikasikan

19. Membayar parkir merupakan salah satu bentuk ketaatan terhadap salah satu peraturan perundang-undangan nasional, yaitu ….

A. PERPPU
B. PP
C. PERDA
D. PERPRES

20. Ketertiban merupakan merupakan ciri dan dasar dari masyarakat yang modern dan maju. Contoh sikap mematuhi peraturan perundang-undangan di lingkungan berbangsa dan bernegara adalah... .

A. disiplin dalam membayar pajak
B. tidak membuat gaduh pada saat pelajaran
C. saling kerjasama antar anggota masyarakat
D. menghormati orang yang lebih tua dan mengasihi yang lebih muda

B. Petunjuk: Jodohkanlah pernyataan di kolom kiri (A) dengan pihak/lembaga yang tepat di kolom kanan (B).

Kolom A (Pernyataan)	Kolom B (Pihak / Lembaga)
1. Pihak yang berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU), membahas, dan mengesahkannya bersama Presiden.	A. Mahkamah Konstitusi
2. Lembaga yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dalam keadaan mendesak.	B. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
3. Lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.	C. Presiden
4. Lembaga yang memiliki wewenang mengawasi pelaksanaan undang-undang dan juga berhak mengajukan RUU tertentu (inisiatif).	D. Mahkamah Agung
5. Pihak yang menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk menjalankan undang-undang.	E. Rakyat (Warga Negara)

LIVEWORKSHEETS

Kolom A (Pernyataan)	Kolom B (Pihak / Lembaga)
6. Lembaga yang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (misalnya PP atau Perpres) terhadap undang-undang.	F. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
7. Pihak yang menetapkan Peraturan Daerah Provinsi.	G. Pemerintah Daerah Provinsi (Gubernur bersama DPRD Provinsi)
8. Pihak yang menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.	H. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Bupati/Wali Kota bersama DPRD Kabupaten/Kota)
9. Pihak yang dapat memberikan masukan, kritik, atau aspirasi terkait penyusunan suatu peraturan perundang-undangan.	I. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
10. Lembaga yang tidak terlibat langsung dalam pembentukan Undang-Undang, tetapi berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.	J. Pemerintah (dalam hal ini, Presiden)

C. Bacalah pernyataan berikut dengan saksama. Pilihlah B jika pernyataan Benar, dan S jika pernyataan Salah.

1. B / S Proses penyusunan Undang-Undang dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan.
2. B / S Hanya Presiden yang berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
3. B / S Dalam pembahasan RUU di DPR, setiap RUU dibahas melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan.
4. B / S Jika DPR dan Presiden tidak mencapai persetujuan terhadap RUU tertentu, RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi pada persidangan berikutnya.
5. B / S Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) disusun dan ditetapkan oleh kementerian terkait dan kemudian disahkan oleh Presiden.
6. B / S Peraturan Daerah (Perda) Provinsi disusun oleh Gubernur dan langsung disahkan tanpa melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi.
7. B / S Undang-Undang harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia agar memiliki kekuatan hukum mengikat.
8. B / S Presiden dapat menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tanpa perlu persetujuan DPR terlebih dahulu dalam keadaan kegentingan yang memaksa.
9. B / S Peraturan Presiden (Perpres) dibuat oleh Presiden untuk mengatur materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah.
10. B / S Aspirasi masyarakat tidak perlu dipertimbangkan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan karena hanya anggota DPR yang berhak memutuskan.

LIVEWORKSHEETS